

PRODIGY
JURNAL PERUNDANG-UNDANGAN
Volume 7, Nomor 2, Desember 2019
SUSUNAN DEWAN REDAKSI

Penanggung Jawab	: Dr. Inosentius Samsul, S.H., M.Hum.
Pemimpin Redaksi / Redaktur	: Mardisontori, S.Ag., LL.M.
Editor	: Akhmad Aulawi, S.H., M.H. Khopiatuziadah, S.Ag., LL.M. Yeni Handayani, S.H., M.H. Bagus Prasetyo, S.H., M.H. Nita Ariyulinda, S.H., M.H. Arif Usman, S.H., M.H. Titi Asmara Dewi, S.H., M.H. R. Priharta Budiprasetya Ekalaya P. Y., S.H., M.Kn.
Mitra Bestari	: Prof. Dr. Zainal Arifin Hoesein, S.H., M.H. Dr. Lidya Suryani Widayati, S.H., M.H. Alfitri, S.Ag., M.Ag., LL.M., Ph.D.
Desain Grafis	: Achmadudin Rajab, S.H., M.H. Noor Ridha Widiyani, S.H. Noval Ali Muchtar, S.H.
Sekretariat	: Fahmi Asy'ari, S.Sos. Ani Maryani, S.E. Muhamad Yunus, S.H. Syarifudin Ade Hardha Gunawan

Alamat
Redaksi Prodigy Jurnal Perundang-Undangan
Pusat Perancangan Undang-Undang, Badan Keahlian DPR RI
Gedung Setjen dan Badan Keahlian DPR RI
Jalan Gatot Subroto, Jakarta Kode Pos 10270
e-mail: prodigyjurnalilmiah@gmail.com dan jurnal.prodigy@dpr.go.id

PRODIGY
JURNAL PERUNDANG-UNDANGAN
Volume 7, Nomor 2, Desember 2019

DAFTAR ISI

Daftar Isi	
Pengantar Redaksi.....	iv
Lembar Abstrak	v-xxiv
Analisis Yuridis Pengaturan Pendidikan Profesi Guru dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen	
<i>Arrista Trimaya</i>	203-220
Analisis Yuridis Pelindungan Jaminan Hak Penyandang Disabilitas dalam Rekrutmen Calon Pegawai Negeri Sipil Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara	
<i>Nita Ariyulinda</i>	221-234
Urgensi Pengaturan Peran Serta Relawan Bencana dalam RUU tentang Penanggulangan Bencana	
<i>Nova Manda Sari</i>	235-250
Analisis Yuridis Urgensi Perubahan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2009 tentang Perfilman	
<i>Tommy Cahya Trinanda</i>	251-263
Pelindungan Hukum atas Data Pribadi di Indonesia (Studi terhadap Pelaksanaan Pelayanan Jasa Telekomunikasi PT. Telekomunikasi Selular)	
<i>Rudi Natamiharja dan Stefany Mindoria</i>	264-279
Kedudukan dan Fungsi Dewan Pers dalam Tatanan Negara Hukum dan Negara Demokrasi	
<i>R. Muhamad Ibnu Mazjah</i>	280-297
Larangan Penistaan Agama dalam Perspektif Pancasila dan Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia	
<i>Stephanie Rebecca Magdalena R. Purba</i>	298-314
Recall: Manifestasi Kedaulatan Partai Politik atau Kedaulatan Rakyat?	
<i>Maria Priscyla Stephanie Florencia Winoto</i>	315-332

Tinjauan Yuridis terhadap Kewenangan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR RI) dalam Wacana Menetapkan Kembali Pokok-Pokok Haluan Negara <i>Sutriyanti</i>	333-346
Konstruksi Hukum dan Dampak Larangan Pindah Partai Politik terhadap Independensi Anggota DPR RI <i>Muhamad Raziv Barokah</i>	347-364
Implikasi Pengaturan Warga Negara sebagai Komponen Cadangan dalam Undang-Undang tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional untuk Pertahanan Negara dengan Wajib Militer <i>Apriyani Dewi Azis</i>	365-379
Analisa Hukum Penerapan Ketetapan Mahkamah Konstitusi dalam Perkara 1/SKLN-XVII/2019 <i>Happy Hayati Helmi dan Anna Erliyana</i>	380-396
Indeks Penulis.....	397-398

PENGANTAR REDAKSI

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT Tuhan Yang Maha Esa atas berkat rahmat dan karuniaNya, sehingga Redaksi dapat menerbitkan Jurnal Perundang-undangan “Prodigy” Volume 7 Nomor 2, Desember 2019. Jurnal ini memuat topik bahasan di bidang hukum dan perundang-undangan yang merupakan hasil kajian lebih lanjut maupun elaborasi dari suatu naskah akademik dan rancangan undang-undang, analisis dari suatu peraturan perundang-undangan, kajian terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan, kajian atas peristiwa hukum yang terjadi, kajian dan teori dari konsepsi hukum, serta gagasan dan analisis terhadap fungsi legislasi.

Dalam penerbitan ini, setiap tulisan telah melalui proses pembahasan dan penyuntingan oleh Redaksi dan telah dilakukan tinjauan secara menyeluruh oleh pembaca ahli (mitra bestari). Keseluruhan tulisan yang disajikan memuat 12 (dua belas) tulisan yang substansinya mencakup permasalahan hukum dan perundang-undangan di bidang politik, hukum, kesejahteraan sosial, ekonomi, serta industri dan pembangunan.

Keseluruhan tulisan yang disajikan dalam jurnal ini meliputi 12 (dua belas) tulisan dengan berbagai tema sebagai berikut: Kesatu, Analisis Yuridis Pengaturan Pendidikan Profesi Guru dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen; Kedua, Analisis Yuridis Pelindungan Jaminan Hak Penyandang Disabilitas dalam Rekrutmen Calon Pegawai Negeri Sipil Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara; Ketiga, Urgensi Pengaturan Peran Serta Relawan Bencana dalam RUU tentang Penanggulangan Bencana; Keempat, Analisis Yuridis Urgensi Perubahan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2009 tentang Perfilman; Kelima, Pelindungan Hukum atas Data Pribadi di Indonesia (Studi terhadap Pelaksanaan Pelayanan Jasa Telekomunikasi PT. Telekomunikasi Selular).

Selanjutnya Keenam, Kedudukan dan Fungsi Dewan Pers dalam Tatanan Negara Hukum dan Negara Demokrasi; Ketujuh, Larangan Penistaan Agama dalam Perspektif Pancasila dan Peraturan Perundang-Undang di Indonesia; Kedelapan, *Recall*: Manifestasi Kedaulatan Partai Politik atau Kedaulatan Rakyat? Kesembilan, Tinjauan Yuridis terhadap Kewenangan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR RI) dalam Wacana Menetapkan Kembali Pokok-Pokok Haluan Negara; Kesepuluh, Konstruksi Hukum dan Dampak Larangan Pindah Partai Politik terhadap Independensi Anggota DPR RI; Kesebelas, Implikasi Pengaturan Warga Negara sebagai Komponen Cadangan dalam Undang-Undang tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional Untuk Pertahanan Negara dengan Wajib Militer; Keduabelas Analisa Hukum Penerapan Ketetapan Mahkamah Konstitusi dalam Perkara 1/SKLN-XVII/2019.

Redaksi berharap dalam setiap penerbitan Jurnal Perundang-undangan “Prodigy” tulisan yang ditampilkan dapat semakin meningkat kualitasnya baik dari sisi teknik penulisan ilmiah maupun substansi. Tentu saja kelemahan dan kekurangan masih banyak ditemui, tetapi dengan upaya perbaikan yang secara terus-menerus dilakukan optimisme bagi peningkatan kualitas tulisan yang ditampilkan akan semakin lebih baik. Oleh karena itu, kritik dan saran konstruktif dari berbagai pihak sangat kami harapkan.

Jakarta, Desember 2019

Redaksi

PRODIGY
JURNAL PERUNDANG-UNDANGAN

VOL. 7 NO. 2, DESEMBER 2019

ISSN 2356-1106

Kata kunci yang dicantumkan adalah istilah bebas. Lembar abstrak ini boleh diperbanyak tanpa izin dan biaya.

Arrista Trimaya

Pusat Perancangan Undang-Undang Badan Keahlian DPR RI

Analisis Yuridis Pengaturan Pendidikan Profesi Guru dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen

Jurnal Prodigy Vol. 7 No. 2, Desember 2019, halaman 203-220

Pasal 4 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (UU tentang Guru dan Dosen), mengatur bahwa kedudukan guru sebagai tenaga profesional berfungsi untuk meningkatkan mutu pendidikan nasional. Pada kenyataannya, masih banyak persoalan penting terkait guru dalam implementasi UU tentang Guru dan Dosen, antara lain belum diaturnya Pendidikan Profesi Guru (PPG) secara sistematis dan komprehensif. Tulisan ini mengangkat permasalahan bagaimana penyelenggaraan PPG yang diatur dalam UU tentang Guru dan Dosen serta bagaimana kendala implementasinya; dan bagaimana upaya mendesain ulang PPG untuk mewujudkan penguatan kompetensi guru secara optimal. Tujuan penulisan ini, yaitu untuk mengetahui penyelenggaraan PPG yang diatur dalam UU tentang Guru dan Dosen serta kendala implementasinya; dan untuk mengetahui upaya mendesain ulang PPG untuk mewujudkan penguatan kompetensi guru secara optimal. Metode penulisan yang digunakan dalam pembahasan adalah metode analisis yuridis normatif, yang menggunakan bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan, buku, jurnal, dan hasil pengumpulan data yang terkait dengan penyelenggaraan PPG. Berdasarkan analisis yang telah dilakukan, pengaturan PPG yang tidak sistematis dan komprehensif tersebut mengakibatkan guru memiliki keterbatasan dalam penguasaan kompetensi sehingga kualitas dan mutu guru masih dianggap rendah. Simpulan tulisan ini yaitu beberapa hal yang menjadi kendala dalam implementasi PPG disebabkan belum terintegrasinya pendidikan akademik dan PPG, terbatasnya sarana dan prasarana Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan (LPTK), serta belum maksimalnya peran Pemerintah dan organisasi profesi. Dengan demikian, perlu upaya mendesain ulang PPG agar tercipta lulusan PPG yang kompeten dan berintegritas untuk menjadi guru yang profesional.

Kata kunci: guru, pendidikan profesi guru, kompetensi, profesional

***Juridical Analysis on Regulation Regarding Teacher Professional Education
Under The Law Number 14 Year 2005 on Teachers and Lecturers***

Prodigy Journal Vol. 7 No. 2, December 2019, page 203-220

Article 4 of Law Number 14 Year 2005 on Teachers and Lecturers (Law on Teachers and Lecturers), regulates that the position of the teacher as a professional has the function to improve quality of national education. But up to now there are still many important issues related to teachers in implementing the Law on Teachers and Lecturers, including the systematic and comprehensive set of Teacher Professional Education (PPG). This paper raises the issue of 1) how the implementation of PPG which is regulated in the Law on Teachers and Lecturers and how the implementation constraints; and 2) how to redesign PPG to realize optimal strengthening of teacher competencies. The purpose of this paper are 1) to know the implementation of PPG regulated in the Law on Teachers and Lecturers and the constraints to its implementation; and 2) to find out the effort to redesign PPG to realize an optimal strengthening of teacher competencies. The writing method that used in this paper is the normative juridical analysis method, which uses primary legal material in the form of legislation, books, journals, and research report related to the implementation of PPG. Based on the analysis that had been done, the unsystematic and incomprehensive set of PPG causes the quality of teachers is still considered low and teachers still had lack of competencies. The conclusion of this paper is, there are still obstacles in the implementation of PPG, for example, the lack of integration of academic education and PPG, the limited facilities and infrastructure of LPTK in the administration of PPG, the inessential role of the Government and professional organizations, etc. Therefore, there is a need to redesign PPG to develop the competence and integrity of PPG graduates as professional teachers.

Keywords: teacher, teacher professional education, competency, professional

PRODIGY
JURNAL PERUNDANG-UNDANGAN

VOL. 7 NO. 2, DESEMBER 2019

ISSN 2356-1106

Kata kunci yang dicantumkan adalah istilah bebas. Lembar abstrak ini boleh diperbanyak tanpa izin dan biaya.

Nita Ariyulinda

Pusat Perancangan Undang-Undang Badan Keahlian DPR RI

Analisis Yuridis Pelindungan Jaminan Hak Penyandang Disabilitas dalam Rekrutmen Calon Pegawai Negeri Sipil Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara

Jurnal Prodigy Vol. 7 No. 2, Desember 2019, halaman 221-234

Dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas (UU tentang Penyandang Disabilitas) mengatur mengenai hak penyandang disabilitas, salah satu hak nya yakni hak pekerjaan. Pemerintah dan Pemerintah Daerah mempunyai kewajiban untuk mempekerjakan Penyandang Disabilitas disesuaikan dengan kemampuan dan kedisabilitasannya. Namun pada kenyataannya di Instansi Pemerintah dan Pemerintah Daerah belum sepenuhnya mempekerjakan penyandang disabilitas sebanyak dua persen dari jumlah pegawai atau karyawan dan muncul permasalahan berupa adanya penolakan bagi penyandang disabilitas saat melamar menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) dikarenakan kedisabilitasannya. Dalam penulisan ini mengangkat permasalahan terkait bagaimanakah pelindungan jaminan hak penyandang disabilitas dalam rekrutmen calon pegawai negeri sipil berdasarkan Undang-Undang tentang Penyandang Disabilitas dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (UU tentang ASN) dan upaya apakah yang harus dilakukan oleh Pemerintah dalam rangka pelindungan jaminan hak penyandang disabilitas dalam perekrutan CPNS. Tujuan penulisan yaitu untuk mengetahui bagaimanakah pelindungan jaminan hak penyandang disabilitas dalam rekrutmen calon pegawai negeri sipil berdasarkan Undang-Undang tentang Penyandang Disabilitas dan UU tentang ASN dan upaya apakah yang harus dilakukan oleh Pemerintah dalam rangka pelindungan jaminan hak penyandang disabilitas dalam perekrutan CPNS. Metode penulisan ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan. Terjadinya penolakan atau pembatalan status CPNS penyandang disabilitas karena kedisabilitasannya yang dilakukan oleh pemberi kerja bertentangan dengan UU tentang Penyandang Disabilitas, UU tentang ASN serta peraturan pelaksanaannya. Oleh sebab itu Pemerintah harus melakukan upaya agar permasalahan serupa tidak terulang kembali.

Kata kunci: penyandang disabilitas, hak bekerja, calon pegawai negeri sipil

***Juridical Analysis of Protection of Disability Rights Guarantee in
Candidate Recording Private Civil Servants Based on Law Number 8 of 2016
Regarding District Number 5 of 2014***

Prodigy Journal Vol. 7 No. 2, December 2019, page 221-234

In the Act No. 8 of 2016 concerning person with disabilities (the Law on Person with Disabilities) regulates the rights of person with disabilities, one of which is the right to work. The Government and Regional Governments have the obligation to employ Person with Disabilities according to their ability and disability. However, in reality, the Government Agencies and Regional Governments have not fully employed persons with disabilities as much as two percent of the total number of employees and problems arise in the form of rejection of person with disabilities when applying for Prospective Civil Servants (CPNS) due to their disability. In this paper raised issues related to how to protect the rights of person with disabilities in the recruitment of prospective civil servants based on the Law on Person with Disabilities and Law Number 5 of 2014 concerning State Civil Apparatus (Law on ASN) and what efforts should be made by the Government in the context of protecting the rights of person with disabilities in the recruitment of CPNS. The purpose of writing is to find out how to protect the rights of person with disabilities in the recruitment of prospective civil servants based on the Law on Person with Disabilities and the Law on ASN and what efforts must be made by the Government in the context of protecting the rights of person with disabilities in the recruitment of CPNS. This writing method uses the normative juridical method with the statutory approach. The occurrence of rejection or cancellation of the status of CPNS of person with disabilities because of disability carried out by employers is contrary to the Law on Disability Abusers, the Law on ASN and the implementing regulations. Therefore the Government must make efforts so that similar problems do not recur.

Keywords: person with disabilities, the right to work, prospective civil servants

PRODIGY
JURNAL PERUNDANG-UNDANGAN

VOL. 7 NO. 2, DESEMBER 2019

ISSN 2356-1106

Kata kunci yang dicantumkan adalah istilah bebas. Lembar Abstrak ini boleh diperbanyak tanpa izin dan biaya.

Nova Manda Sari

Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI

Urgensi Pengaturan Peran Serta Relawan Bencana dalam RUU tentang Penanggulangan Bencana

Jurnal Prodigy Vol. 7 No. 2, Desember 2019, halaman 235-250

Indonesia merupakan negara rawan bencana sehingga disebut juga negara cincin api. Sejak gempa dan tsunami di Aceh tahun 2004, Indonesia belum memiliki sistem nasional penanggulangan bencana. Atas usul inisiatif DPR disahkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana. Namun terdapat permasalahan dalam pengaturan maupun implementasi, diantaranya belum ada pengaturan peran serta relawan bencana. Saat ini, atas usul inisiatif DPR menyetujui untuk membentuk rancangan undang-undang tentang Penanggulangan Bencana sebagai pengganti UU tentang Penanggulangan Bencana. Selama ini hanya ada Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 17 Tahun 2011 tentang Pedoman Relawan Penanggulangan Bencana. Permasalahannya, apa yang menjadi urgensi pengaturan peran serta relawan bencana dalam rancangan undang-undang tentang Penanggulangan Bencana? Apa materi muatan yang perlu diatur terkait peran serta relawan bencana dalam rancangan undang-undang tentang Penanggulangan Bencana. Tulisan ini bertujuan untuk mengetahui urgensi pengaturan peran serta relawan bencana dan materi muatan yang perlu diatur terkait peran serta relawan bencana dalam rancangan undang-undang tentang Penanggulangan Bencana. Metode penulisan yang digunakan adalah metode yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan. Urgensinya disini agar Indonesia memiliki relawan bencana yang berkompeten, berdayaguna dan memiliki payung hukum. Materi muatan yang perlu diatur antara lain: calon relawan bencana harus bergabung dalam organisasi relawan bencana; relawan bencana terdiri dari relawan bencana ahli dan/atau tersertifikasi; pendataan relawan bencana oleh organisasi relawan bencana; dan adanya jaminan perlindungan relawan bencana dari Pemerintah yang terdiri dari perlindungan hukum, sosial, dan kesehatan.

Kata kunci: relawan bencana, penanggulangan bencana, rancangan undang-undang

Urgency of Regulating the Role of Disaster Volunteers in the Bill of Disaster Management

Prodigy Journal Vol. 7 No. 2, December 2019, page 235-250

Indonesia is a disaster-prone country so it is also called the ring of fire country. Since the earthquake and tsunami in Aceh in 2004, Indonesia has not had a national disaster management system. At the suggestion of the House of Representatives' initiative, Law Number 24 year 2007 on Disaster Management was passed. However, there are problems in the arrangement and implementation, including not yet the regulation of the role of disaster volunteers. Nowadays, at the suggestion of the House of representative's approval for making the bill of Disaster Management in lieu of a Law on Disaster Management. So far, there is only the Regulation of the Head of the National Disaster Management Agency No. 17 year 2011 on Disaster Management Volunteer Guidelines. The problem is what is the urgency of regulating the role of disaster volunteers in the bill of Disaster Management? What about the contents need to be regulated the role of disaster volunteers in the bill of on Disaster Management. This paper aims to find out the urgency of regulating the role of disaster volunteers and the contents need to be regulated the role of disaster volunteers in the bill of Disaster Management. The writing method used is a normative juridical method with a statute approach. The urgency here is for Indonesia to have competent, powerful, and legal umbrella disaster volunteers. The contents need to be regulated: candidate of disaster volunteers must join in disaster volunteer organization; disaster volunteers are consisting of expert and / or certified disaster volunteers; data collection of disaster volunteers by disaster volunteer organizations; and the existence of guarantees for the protection of disaster volunteers from the Government consisting of legal, social and health protection.

Keywords: disaster volunteers, disaster management, draft laws

PRODIGY
JURNAL PERUNDANG-UNDANGAN

VOL. 7 NO. 2, DESEMBER 2019

ISSN 2356-1106

Kata kunci yang dicantumkan adalah istilah bebas. Lembar abstrak ini boleh diperbanyak tanpa izin dan biaya.

Tommy Cahya Trinanda

Pusat Perancangan Undang-Undang Badan Keahlian DPR RI

Analisis Yuridis Urgensi Perubahan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2009 tentang Perfilman

Jurnal Prodigy Vol. 7 No. 2, Desember 2019, halaman 251-263

Film merupakan salah satu media komunikasi muncul sejak masa penjajahan Belanda. Semenjak masa itu pula, telah lahir berbagai regulasi yang mengatur tentang tata kelola perfilman di Indonesia. Seiring dengan perkembangan jaman, pergeseran nilai film sebagai bagian dari proses budaya dan komunikasi masyarakat, perkembangan teknologi, serta untuk mengatasi permasalahan perfilman yang terjadi di Indonesia, perlu adanya perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2009 tentang Perfilman. Adanya perubahan tersebut diharapkan mampu mengatasi berbagai permasalahan maupun memberikan keadilan dan kepastian hukum bagi kegiatan perfilman di Indonesia, baik yang bersifat komersial maupun nonkomersial, ataupun proses kreatif perfilman. Tulisan ini bertujuan untuk mengetahui berbagai permasalahan dalam Undang-Undang tentang Perfilman, seperti permasalahan kelembagaan perfilman dan kapasitas sumberdaya manusia yang selama ini belum berjalan maksimal, serta memberikan gambaran bagaimana seharusnya perubahan dilakukan untuk mengatasi masalah tersebut. Metode penulisan yang digunakan berupa metode hukum normatif dengan studi kepustakaan yang terkait dengan perfilman. Perubahan Undang-Undang tentang Perfilman menjadi sangat penting untuk memberikan pengaturan kegiatan dan kelembagaan perfilman Indonesia menjadi lebih baik dan memberikan kepastian hukum.

Kata kunci: perfilman, undang-undang, urgensi

Juridical Analysis of The Urgency Amendment to Act Number 33 of 2009 About Movie

Prodigy Journal Vol. 7 No. 2, December 2019, page 251-263

Film is one of the communication media emerged since the Dutch colonial period. Since that time, various regulations have also been established which regulate film management in Indonesia. Along with the development of the times, the shift in the value of film as part of the cultural process and public communication, technological development, and to overcome the problems of cinema that occur in Indonesia, there needs to be a change to Law No. 33 of 2009 About Movie. The change is expected to be able to overcome various problems and provide justice and legal certainty for film activities in Indonesia, both commercial and non-commercial, or the creative process of film. This paper aims to find out various problems in the Law on Movie, such as the institutional problems of film and human resource capacity that have not been running optimally so far, and provide an idea of how changes should be made to overcome the problem. The writing method used is in the form of a normative legal method with literature studies related to film. The amendment to the Law on Movie has become very important to provide better regulation of the activities and institutions of Indonesian cinema and provide legal certainty.

Keywords: movies, act, urgency

PRODIGY
JURNAL PERUNDANG-UNDANGAN

VOL. 7 NO. 2, DESEMBER 2019

ISSN 2356-1106

Kata kunci yang dicantumkan adalah istilah bebas. Lembar abstrak ini boleh diperbanyak tanpa izin dan biaya.

Rudi Natamiharja

Dosen Fakultas Hukum – Universitas Lampung

Stefany Mindoria

Mahasiswa Fakultas Hukum – Universitas Lampung

Pelindungan Hukum atas Data Pribadi di Indonesia

(Studi terhadap Pelaksanaan Pelayanan Jasa Telekomunikasi PT. Telekomunikasi Selular)

Jurnal Prodigy Vol. 7 No. 2, Desember 2019, halaman 264-279

Perlindungan terhadap hak privasi di Indonesia masih relatif rendah dan kurang mendapatkan perhatian serius. Padahal hak privasi merupakan hak dasar yang dilindungi oleh Undang-Undang Dasar 1945. Salah satu bagian dari hak privasi yang hendak disoroti di sini yaitu perlindungan terhadap data pribadi. Nomor telepon merupakan salah satu dari data pribadi akan tetapi hal ini kurang disadari. Melalui nomor telepon dapat diketahui identitas pengguna hal ini dimungkinkan karena registrasi dilakukan dengan memasukkan informasi Nomor Induk Kependudukan. Tulisan ini hendak menjawab dua permasalahan: *pertama*, bagaimanakah perlindungan hukum data pribadi di Indonesia dan *kedua*, bagaimanakah PT Telkomsel memberikan jaminan perlindungan kerahasiaan data pribadi terhadap pelanggannya. Tulisan ini bertujuan untuk mengetahui perlindungan hukum data pribadi dan mengetahui bentuk jaminan kerahasiaan yang diberikan oleh PT Telkomsel. Metode yang digunakan dalam penulisan ini yaitu yuridis normatif. Berdasarkan hasil penelitian, ditemukan bahwa perlindungan terhadap hak privasi dan data pribadi telah ditetapkan berdasarkan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika No. 12 Tahun 2016 tentang Registrasi Pelanggan Jasa Telekomunikasi dan Nomor 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi dalam Sistem Elektronik. PT Telkomsel memberikan perlindungan berdasarkan dua ketentuan tersebut, tetapi terdapat perjanjian antara PT Telkomsel dengan pelanggan yang secara langsung mengikat ketika melakukan registrasi dan validasi dimana dalam perjanjian tersebut PT Telkomsel memiliki kewenangan untuk memberikan data pelanggan kepada pihak ketiga yang bekerja sama dengannya. PT Telkomsel seharusnya tidak menyembunyikan klausula ini untuk diketahui oleh pelanggan dan memberikan kemudahan kepada pelanggan jika tidak menginginkan lagi menerima pesan singkat promosi dari pihak ketiga tersebut. Kata kunci: hak privasi, data pribadi, hak dasar

Legal Protection of Personal Data in Indonesia

(Study of The Implementation of Telecommunications Services at PT. Telekomunikasi Selular)

Prodigy Journal Vol. 7 No. 2, December 2019, page 264-279

Protection of privacy rights in Indonesia is still relatively low and lacks serious attention. Even though the privacy rights is a basic right protected by the Indonesian Constitution 1945. One part of the right to privacy that we want to highlight here is protection of personal data. The telephone number is one of the personal data but this is not realized. Through the telephone number the user can be identified because registration is done by entering the Population Identification Number information. This paper try to answer two problems: first, how is the legal protection of personal data in Indonesia and second, how does PT Telkomsel guarantee the confidentiality of personal data for its customers. This paper aims to know the legal protection of personal data. The method used in this paper is juridical normative. Based on the results of the study, it was found that protection of privacy rights and personal data has been determined based on the Regulations of the Minister of Communication and Information Number 12 of 2016 regarding the Telecommunications Services Customer Registration and Number 20 of 2016 regarding Personal Data Protection in Electronic Systems. PT Telkomsel provides protection based on these two provisions, but there is an agreement between PT Telkomsel and customers that is directly binding when registering and validating wherein the agreement PT Telkomsel has the authority to provide customer data to third parties that work with it. PT Telkomsel should not hide this clause to be known by customers and provide convenience to customers if they no longer want to receive promotional messages from these third parties.

Keywords: privacy rights, personal data, fundamental rights

PRODIGY
JURNAL PERUNDANG-UNDANGAN

VOL. 7 NO. 2, DESEMBER 2019

ISSN 2356-1106

Kata kunci yang dicantumkan adalah istilah bebas. Lembar abstrak ini boleh diperbanyak tanpa izin dan biaya.

R. Muhamad Ibnu Mazjah

Dosen Program Pascasarjana Universitas Mathla'ul Anwar

Kedudukan dan Fungsi Dewan Pers dalam Tatanan Negara Hukum dan Negara Demokrasi

Jurnal Prodigy Vol. 7 No. 2, Desember 2019, halaman 280-297

Fungsi Dewan Pers sebagaimana tertuang dalam undang-undang antara lain untuk melindungi kemerdekaan pers dari campur tangan pihak lain dan melakukan pengkajian untuk pengembangan kehidupan pers. Bertalian dengan kedua fungsi tersebut, tidak tertuang ketentuan mengenai tata kerja bagi anggota Dewan Pers, sehingga Dewan Pers melakukan langkah dengan mengeluarkan peraturan kebijakan yang pengaturannya tidak tertulis di dalam undang-undang. Peraturan itu mengatur tentang standar kompetensi wartawan yang tertuang dalam Peraturan Dewan Pers Nomor 01/Peraturan-DP/X/2018. Permasalahan mencuat, karena selain tidak diatur dalam UU tentang Pers, proses dan tata cara pelaksanaan standar kompetensi pengaturannya tercakup di dalam ketentuan undang-undang lain, Peraturan Dewan Pers Nomor 01/Peraturan-DP/X/2018, dinilai tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan serta bersifat kontraproduktif terhadap iklim kemerdekaan pers dan demokrasi. Untuk menyelaraskan Peraturan Dewan Pers Nomor 01/Peraturan-DP/X/2018 berikut kedudukan Dewan Pers dengan prinsip-prinsip negara hukum dan negara demokrasi, maka dilakukan batu uji dalam penulisan ilmiah ini dengan menggunakan instrumen hukum administrasi. Metode penelitian yang dilakukan untuk penelitian ini adalah dengan tipe atau spesifikasi penelitian normatif. Penulisan ilmiah ini kemudian menyimpulkan Dewan Pers bukanlah badan atau pejabat tata usaha negara yang berwenang menciptakan peraturan kebijaksanaan akan tetapi Dewan Pers hanyalah dewan yang berfungsi sebagai wadah musyawarah untuk melakukan pengkajian dan pengembangan kehidupan pers serta lembaga pengawas dalam pelaksanaan kode etik jurnalistik berdasarkan prinsip-prinsip negara hukum dan negara demokrasi. Akan halnya dengan kedudukan Peraturan Dewan Pers Nomor 01/Peraturan-DP/X/2018 tidak memiliki validitas hukum karena tidak memiliki kekuatan administratif disebabkan menurut UU tentang Pers memiliki pandangan sifat profesi wartawan bersifat luwes karena bisa dilakukan oleh setiap warga negara.

Kata kunci: dewan pers, negara hukum, demokrasi

The Position and Function of Press Council Within Law and Democratic Perspective

Prodigy Journal Vol. 7 No. 2, December 2019, page 280-297

The function of the Press Council as stated in the law includes protecting the freedom of the press from the interference of other parties and conducting studies for the development of the life of the press. In connection with these two functions, there are no stipulations regarding the work procedures for members of the Press Council, so that the Press Council innovates in the form of issuing policy regulations whose arrangements are not written in the law. The regulation regulates the competency standards of journalists as set out in Press Council Regulation Number 01 / Peraturan-DP/X/2018. The problem arises, because in addition to not being regulated in the Law on the Press, the process and procedures for implementing competency standards are included in the provisions of other laws, such as the Law on Employment and the Law on Teachers and Lecturers. Press Council Regulation No. 01/Peraturan-DP/X/2018 thus, was deemed not in accordance with statutory provisions and was counterproductive to the climate of freedom of the press and democracy. To align the Press Council Regulation No. 01 / Peraturan-DP/X/2018 and the Press Council's Position with the principles of the rule of law and the democratic state, a touchstone in scientific writing was carried out using administrative legal instruments. The research method used for this research is the type or specification of normative research. This scientific writing then concludes that the Press Council is not a state administrative body or authority that is authorized to create policy regulations, but the Press Council is only a council that serves as a forum for deliberation to conduct studies and development of the life of the press and supervisory institutions in the implementation of journalistic code of ethics based on state principles law and democratic state. As for the position of Press Council Regulation Number 01/Regulation-DP / X / 2018, it does not have legal validity because it does not have administrative power because according to the Law on the Press, the journalist profession is flexible because it can be done by every citizen.

Keywords: press council, law state, democracy

PRODIGY
JURNAL PERUNDANG-UNDANGAN

VOL. 7 NO. 2, DESEMBER 2019

ISSN 2356-1106

Kata kunci yang dicantumkan adalah istilah bebas. Lembar abstrak ini boleh diperbanyak tanpa izin dan biaya.

Stephanie Rebecca Magdalena R. Purba

Pusat Perancangan Undang-Undang Badan Keahlian DPR RI

Larangan Penistaan Agama dalam Perspektif Pancasila dan Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia

Jurnal Prodigy Vol. 7 No. 2, Desember 2019, halaman 298-314

Pancasila sebagai ideologi bangsa adalah sebuah identitas. Ideologi dengan lima sila yang memiliki nilai budaya dan religius. Indonesia yang terdiri dari beragam budaya, suku, bahasa, dan enam agama yang oleh negara diakui, yaitu: Islam, Kristen Protestan, Katholik, Hindu, Buddha dan Kong Hu Cu. Para pendiri bangsa ini telah bersepakat bahwa Indonesia adalah negara yang berketuhanan, bukan negara agama. Beragam kasus penistaan agama yang terjadi di Indonesia pada tahun-tahun terakhir dan semakin meresahkan ketika isu agama seringkali dikaitkan dengan politik. Tidak hanya rakyat biasa, para pemimpin bangsa dan pemuka agama juga turut tersangkut kasus penistaan agama. Alih-alih membela agama yang dianut, para pemeluk agama mengesampingkan sikap toleransi antar umat beragama dengan menista agama lain. Hal tersebut sungguh disesalkan, karena Pancasila sebagai landasan idiil bangsa Indonesia seperti telah memudar dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Oleh karena itu, untuk mengetahui secara jelas bagaimanakah larangan penistaan agama di Indonesia, perlu mengkaji amanah Pancasila melalui butir-butir Pancasila dan peraturan perundang-undangan di Indonesia yang menjadi batasan dan arah untuk terciptanya Indonesia yang harmonis dalam berketuhanan. Larangan penistaan agama memberikan batasan yang jelas agar setiap umat beragama di Indonesia berhak memeluk agama dan kepercayaannya masing-masing dengan tidak mengesampingkan hukum, demokrasi, hak asasi manusia, ketertiban umum, dan nilai-nilai agama itu sendiri. Kata kunci: agama, penista agama, pancasila, peraturan perundang-undangan

The Defamation of Religion in the Perspective of Pancasila and Laws in Indonesia

Prodigy Journal Vol. 7 No. 2, December 2019, page 298-314

Pancasila as the ideology of the nation is an identity. Ideology with having five come of the cultural and religious. Indonesia consisting of diverse culture, of, language, and six religion by state recognized, Islam, Protestant, Catholic, Hindu, Buddhist and Confucius. The founders of this nation have agreed that Indonesia is a country which believes in God, is not the state religion. Various cases the defamation of religion that happened in Indonesia for the last few years of and the more disturbing when religious issues often associated with political. Not only the common people, nation leaders and religious leaders have also stuck cases the defamation of religion. Instead of defend their religion, the community do exclusion of attitude tolerance between religion with spurned a religion other. This condition really regrettable, because Pancasila as the basis of Indonesian ideology has disappear in our nation and state. Hence, to know clearly how ban, defamation of religion in Indonesia need to assess the mandate pancasila through items pancasila and legislation in Indonesia to scope and direction to the creation of Indonesia harmonious divine. Banning the defamation of religion gave them clear different restrictions for all religious communities in Indonesia without putting a side the law, democracy, human rights, public order, and religious values itself.

Keywords: religion, defamation of religion, Pancasila, laws and regulations

PRODIGY
JURNAL PERUNDANG-UNDANGAN

VOL. 7 NO. 2, DESEMBER 2019

ISSN 2356-1106

Kata kunci yang dicantumkan adalah istilah bebas. Lembar abstrak ini boleh diperbanyak tanpa izin dan biaya.

Maria Priscyla Stephanie Florencia Winoto

Pusat Perancangan Undang-Undang Badan Keahlian DPR RI

Recall: Manifestasi Kedaulatan Partai Politik atau Kedaulatan Rakyat?

Jurnal Prodigy Vol. 7 No. 2, Desember 2019, halaman 315-332

Pengaturan *recall* merupakan salah satu alasan penggantian antarwaktu (PAW) anggota legislatif, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (UU tentang MD3) dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (UU tentang Parpol). Kedua pengaturan *recall* tersebut memberikan kewenangan kepada partai politik untuk dapat memberhentikan anggota legislatif apabila diusulkan oleh partai politiknya dan/atau melanggar Anggaran Dasar/ Anggaran Rumah Tangga (AD/ART). Akibatnya *recall* sering menjadi ranah kesewenangan bagi partai politik, berbagi jabatan dalam satu periode keanggotaan legislatif, dan menempuh upaya hukum yang berlarut-larut. Sementara itu, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945) dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU tentang Pemilu) mengatur bahwa wakil rakyat dipilih melalui pemilihan umum (pemilu) oleh konstituen. Oleh karena itu, terjadi kontradiktif terhadap *recall*, di satu sisi *recall* sebagai daulat partai politik, namun di sisi lain wakil rakyat dipilih dan bertanggungjawab kepada konstituen. Padahal dengan sistem pemilu saat ini yang proporsional terbuka dan berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22-24/PUU-VI/2008, *recall* harus mempertimbangkan kepentingan konstituen. Tulisan ini ditujukan untuk mengetahui pengaturan *recall* di Indonesia dalam berbagai peraturan perundang-undangan dan mengetahui pengaturan *recall* yang efektif untuk memmanifestasikan kedaulatan rakyat dan kedaulatan parpol. Metode penulisan adalah yuridis analitis dengan spesifikasi penulisan deskriptif analitis. Hasil pembahasan menyimpulkan: Pertama, sejarah pengaturan *recall* di Indonesia sejak pertama kali diundangkan masih menunjukkan *recall* sebagai daulat parpol, sehingga menimbulkan banyak kesewenangan *recall* oleh parpol yang tidak transparan kepada konstituen. Kedua, *recall* seharusnya mengkombinasikan kedaulatan parpol dan kedaulatan rakyat, dengan mencontoh model petisi oleh konstituen seperti di Amerika Serikat, serta memangkas upaya hukum di pengadilan terhadap *recall*.

Kata kunci: *recall*, kedaulatan, partai politik, konstituen

Recall: The Sovereignty of Political Partij or The Sovereignty of Constituen?

Prodigy Journal Vol. 7 No. 2, December 2019, page 315-332

The regulation toward recall is one of the reasons for change between times to the Member of the Parliament (MP), as arranged on Act Number 17 of 2014 concerning the People's Consultative Assembly, the House of Representatives, the Regional Representatives Counsel, and the Regional House of Representatives and Act Number 2 of 2008 concerning Political Partij. Both of these recall act give the authority to the political partij to dismiss the MP, if proposed by their political partij and/or if the MP violate the Article of the Association/Bylaws. As a result, recall often becomes arbitrary sphere by the political partij, just share the position as the MP in one period, and unending legal actions on courts. Meanwhile, the Constitution of Republic of Indonesia of 1945 and Act Number 7 of 2017 concerning General Election stipulate the MP are elected through general election by constituent. Therefore, happened contradictory to recall, on one side recall as sovereignty of political partij, but on the other hand the MP choosen and responsible to a constituent. Whereas, by proportionally open general election system in Indonesia nowadays and based on Constitutional Court Decission Number 22-24/PUU-VI/2008, recall not only supposed to be as the sovereignty of the political partij anymore, but also consider the opinions of the constituen. This paper aim to analysis the regulations toward recall in Indonesia since the beginning, and also to analysis the effective recall regulation to manifest the sovereignty of the political partij and the sovereignty of the constituen. The writing method was juridical analysis with descriptive analysis writing specification. The results of this paper show: First, the history of regulations toward recall in Indonesia since the beginning until now is showing recall as the sovereignty of the political party only, and the result by those regulations was arbitratriness by the political partij without transparent reason to the constituen. Second, recall should combine the sovereignty of the political partij and the sovereignty of the constituen, by follow the petition model by the constituen in United States, and also trim the legal actions toward recall on courts.

Keywords: recall, sovereignty, political partij, contituen

PRODIGY
JURNAL PERUNDANG-UNDANGAN

VOL. 7 NO. 2, DESEMBER 2019

ISSN 2356-1106

Kata kunci yang dicantumkan adalah istilah bebas. Lembar abstrak ini boleh diperbanyak tanpa izin dan biaya.

Sutriyanti

Pusat Perancangan Undang-Undang Badan Keahlian DPR RI

Tinjauan Yuridis terhadap Kewenangan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR) dalam Wacana Menetapkan Kembali Pokok-Pokok Haluan Negara

Jurnal Prodigy Vol. 7 No. 2, Desember 2019, halaman 333-346

Amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945) sebanyak 4 (empat) kali telah menempatkan MPR tidak lagi menjadi lembaga tertinggi negara. Amandemen tersebut juga menyebabkan berkurangnya kewenangan MPR yaitu salah satunya menetapkan garis-garis besar haluan negara (GBHN). Namun kini GBHN mulai dibicarakan kembali dan MPR berencana untuk menghidupkan kembali GBHN dengan nama baru pokok-pokok haluan negara (PPHN) sebagai panduan untuk menjalankan kehidupan ketatanegaraan Indonesia. Permasalahan dalam tulisan ini adalah bagaimana kewenangan MPR dalam merumuskan PPHN dan bagaimana konsekuensi logis pilihan instrumen perumusan dan penetapan PPHN yang dibuat oleh MPR. Tujuan tulisan ini adalah untuk mengetahui kewenangan MPR dalam merumuskan PPHN dan konsekuensi logis pilihan instrumen perumusan dan penetapan PPHN yang dibuat oleh MPR. Tulisan ini disusun dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif. Menghadirkan kembali GBHN dalam sistem ketatanegaraan Indonesia menghadapi berbagai tantangan legalitas dikarenakan MPR tidak lagi memiliki kewenangan membuat produk hukum yang bersifat mengikat keluar. Konsekuensi pilihan instrumen hukum untuk memperkuat PPHN dengan meletakkannya dalam undang-undang ataupun mengamandemen lagi UUD NRI Tahun 1945. Apabila PPHN tidak mempunyai payung hukum yang kuat, PPHN akan sulit menjadi pedoman kehidupan bernegara karena tidak akan ditaati oleh lembaga negara dan pemerintah daerah.

Kata kunci: kewenangan, haluan negara, perencanaan, pembangunan nasional

Legal Review of Authority of the People's Consultative Assembly of The Republic of Indonesia (MPR) in the Discourse of Determining State Fundamentals

Prodigy Journal Vol. 7 No. 2, December 2019, page 333-346

Amendments to the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia (1945 Constitution) 4 (four) times have placed the MPR no longer the highest state institution. The amendment also reduced the authority of the MPR, one of which was to set the guidelines for the state policy (GBHN). But now the GBHN has begun to be discussed again and the MPR plans to revive the GBHN under the new name of the state policy guidelines (PPHN) as a guide for carrying out the life of the Indonesian state administration. The problem in this paper is how the MPR's authority in formulating PPHN and what are the logical consequences of the choice of PPHN formulation and determination instruments made by the MPR. The purpose of this paper is to determine the authority of the MPR in formulating PPHN and the logical consequences of the instrument for the formulation and determination of PPHN made by the MPR. This paper was prepared using a normative juridical approach. Bringing back the GBHN in the Indonesian constitutional system faced a variety of legality challenges because the MPR no longer had the authority to make binding legal products. The consequences of the choice of legal instruments to strengthen PPHN by putting it in law or amending the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia. If PPHN does not have a strong legal umbrella, PPHN will be difficult to guide the life of the state because it will not be obeyed by state institutions and local governments.

Keywords: authority, state direction, planning, national development

PRODIGY
JURNAL PERUNDANG-UNDANGAN

VOL. 7 NO. 2, DESEMBER 2019

ISSN 2356-1106

Kata kunci yang dicantumkan adalah istilah bebas. Lembar abstrak ini boleh diperbanyak tanpa izin dan biaya.

Muhamad Raziv Barokah

SETARA Institute

Konstruksi Hukum dan Dampak Larangan Pindah Partai Politik terhadap Independensi Anggota DPR RI

Jurnal Prodigy Vol. 7 No. 2, Desember 2019, halaman 347-364

Partai politik merupakan organisasi fundamental karena dapat memengaruhi pengisian jabatan politik seperti legislator. Khusus di Indonesia seseorang tidak dapat menjadi anggota DPR tanpa melalui partai politik. Di negara yang demokrasinya maju, setiap anggota partai yang menduduki jabatan legislatif diberikan keleluasaan untuk membela suara konstituennya dibanding perintah partai politik. Seperti di Amerika, anggota parlemen yang pindah partai politik akibat lebih membela kepentingan konstituen dibanding perintah partai tidak dapat dicopot keanggotaan parlemennya. Namun di beberapa negara lain, perpindahan keanggotaan partai politik saat masa jabatan memberikan hak kepada partai untuk mencopot status keanggotaan parlemennya. Kondisi demikian menempatkan anggota parlemen dalam posisi yang dilematis. Mereka harus tetap berdiri mendukung kebijakan atas dasar perintah partai jika tidak ingin kehilangan jabatan. Meskipun hal tersebut bertentangan dengan kehendak pemilih. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran kerangka hukum mengenai pindah keanggotaan partai politik dan dampaknya terhadap demokrasi Indonesia. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa sebagai negara demokrasi yang tergolong baru, Indonesia menerapkan larangan perpindahan keanggotaan partai politik bagi anggota legislatif. Larangan tersebut dilakukan dengan memberikan hak *recall* kepada partai politik untuk mencabut keanggotaan parlemen dan menggantikannya dengan anggota lain. Terdapat dampak baik dan buruk dari pelarangan ini. Dampak baiknya adalah untuk menjaga stabilitas pemerintahan baik legislatif maupun eksekutif. Sedangkan dampak buruknya adalah tersandernya demokrasi substansial ketika terjadi perbedaan antara kehendak konstituen dengan kepentingan partai. Terbukti dari rapat paripurna pengesahan undang-undang dari tahun 2012 – 2018, hanya ada satu rapat dimana anggota parlemen berbeda pendapat dengan fraksi.

Kata kunci: partai politik Indonesia, larangan pindah partai politik, demokrasi perwakilan

**The Legal Construction and Impact of the Prohibition of Party Switching
on the Independence of Parliament Members in the People's Consultative Body of the Republic of Indonesia**

Prodigy Journal Vol. 7 No. 2, December 2019, page 347-364

Political parties are fundamental organizations cause it can influence the filling of public positions like a legislator. Specifically, in Indonesia, a person cannot become a member of Parliament without going through a political party. In developed democracies, every party member occupying a legislative position is given the discretion to defend the voice of his constituents over the command of a political party. As in America, MPs who move political parties in order to defend his constituent during their term of office cannot be removed from their parliamentary membership by political parties. Nevertheless, in some other countries, the transfer of political party membership during the term of office gives the party the right to remove the status of its parliamentary membership. Such conditions place MPs in a dilemma position. They must remain standing in favor of policies based on party orders if they do not want to lose office, although this is against the will of the voters. This study aims to provide an overview of the legal framework regarding the transfer of political party membership and its impact on Indonesian democracy. The results of this study indicate that as a relatively new democracy, Indonesia has implemented a ban on the transfer of membership of political parties to legislators. The ban was carried out by giving the right of recall to political parties to revoke parliamentary membership and replace it with other members. There are good and bad effects of this prohibition. The good impact is to maintain the stability of the government, both legislative and executive. While the bad impact is resisting the substantial democracy when there is a difference between the will of the constituents and the interests of the party. Evidenced by the plenary meeting of the legalization of the law from 2012 - 2018, there was only one meeting where MPs differed from the faction.

Keywords: Indonesia political party, prohibition of party switching, representative democracy

PRODIGY
JURNAL PERUNDANG-UNDANGAN

VOL. 7 NO. 2, DESEMBER 2019

ISSN 2356-1106

Kata kunci yang dicantumkan adalah istilah bebas. Lembar abstrak ini boleh diperbanyak tanpa izin dan biaya.

Apriyani Dewi Azis

Pusat Perancangan Undang-Undang Badan Keahlian DPR RI

Implikasi Pengaturan Warga Negara sebagai Komponen Cadangan dalam Undang-Undang tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional untuk Pertahanan Negara dengan Wajib Militer

Jurnal Prodigy Vol. 7 No. 2, Desember 2019, halaman 365-379

Dalam era globalisasi, ancaman semakin meluas dan beragam. Terdapat jenis ancaman yaitu ancaman militer, ancaman nonmiliter, dan ancaman hibrida. Ancaman saat ini sudah bersifat multidimensional yang berasal dari dalam ataupun dari luar negeri. Upaya pertahanan negara penting untuk dilakukan dalam menghadapi ancaman. Bela negara berhubungan dengan fungsi pertahanan negara yaitu terkait dengan hak dan kewajiban warga negara untuk ikut serta dalam upaya pertahanan negara. Penyelenggaraan pertahanan negara dilaksanakan melalui sistem pertahanan dan kemananan rakyat semesta dengan melibatkan rakyat sebagai komponen cadangan. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara telah mengamankan komponen cadangan diatur dengan undang-undang. Tahun 2019 telah dibentuk Undang-Undang tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional untuk Pertahanan Negara (UU tentang PSDN) mengatur mengenai pengelolaan sumber daya manusia, sumber daya alam, dan sumber daya buatan, serta sarana dan prasarana nasional yang digunakan untuk menjadi kekuatan dan kepentingan pertahanan negara dalam menghadapi ancaman. Terdapat permasalahan yaitu keikutsertaan warga negara sebagai komponen cadangan tersebut bersifat wajib militer atau tidak. Tulisan ini bertujuan untuk mengetahui pengaturan warga negara sebagai komponen cadangan dalam UU tentang PSDN dan implikasi pengaturan warga negara sebagai komponen cadangan berdasarkan UU tentang PSDN dengan wajib militer. Tulisan ini disusun dengan pendekatan yuridis normatif. Pengaturan komponen cadangan dalam UU tentang PSDN sudah komprehensif dan merupakan hal yang penting untuk memperkuat komponen utama (Tentara Nasional Indonesia) dalam sistem pertahanan negara. Pengaturan komponen cadangan itu tidak berarti wajib militer bagi setiap warga negara. Keikutsertaan warga negara tersebut bersifat sukarela.

Kata kunci: pertahanan negara, komponen cadangan, wajib militer

Implication of The Regulation of Citizen as a Reserve Component in Law on Management of National Resources for State Defense with Military Conscript

Prodigy Journal Vol. 7 No. 2, December 2019, page 365-379

In the globalization era, threats are more widespread and varied. There are types of threats that is military threats, non-military threats, and hybrid threats. Nowadays threats already is multidimensional from within country or foreign. State defense efforts are important to do to face of threats. Compulsary state defense related to the function of state defense that is rights and obligations of citizens to participate in the state defense effort. The enforcement of state defense is implemented through the defense and security system of the universal people with involved the people as a reserve component. Law Number 3 of 2002 concerning National Defense mandates that the reserve component is regulated by law. In 2019 the Law on the Management of National Resources for State Defense (Law on PSDN) is regulate about management of human resources, natural resources, and artificial resources, as well as national facilities and infrastructure is used to become the strength and interests of state defense to face the threats. There is a problem that the participated of citizen as reserve component is military conscript or not. This paper aims to know regulation citizen as reserve component in the Law on PSDN and the implications of regulation citizen as a reserve component in the Law on PSDN with military conscript. This paper was using a normative juridical approach. The regulation of reserve component in the Law on PSDN has comprehensive and it is important to strengthen the main components (Indonesian Army) in the state defense system. The regulation of the reserve component does not mean military conscript for citizen. The participation of these citizen is voluntary.

Keywords: state defense, reserve component, military conscript

PRODIGY
JURNAL PERUNDANG-UNDANGAN

VOL. 7 NO. 2, DESEMBER 2019

ISSN 2356-1106

Kata kunci yang dicantumkan adalah istilah bebas. Lembar abstrak ini boleh diperbanyak tanpa izin dan biaya.

Happy Hayati Helmi

Lawyer Law Firm Sidin Constitution

Anna Erliyana

Guru Besar Tetap Hukum Administrasi Negara Universitas Indonesia

Analisa Hukum Penerapan Ketetapan Mahkamah Konstitusi dalam Perkara 1/SKLN-XVII/2019

Jurnal Prodigy Vol. 7 No. 2, Desember 2019, halaman 380-396

Ketetapan yang diterbitkan MK dalam perkara 1/SKLN-XVII/2019 telah mengakibatkan ketidakpastian hukum. Mahkamah konstitusi sebagai lembaga peradilan pengawal undang-undang (*the guardian of Indonesian Law*) dan sebagai penafsiran konstitusi (*the Sole Interpreter of the Constitution*), seharusnya lebih mengutamakan kepastian hukum terutama dalam penyelesaian permasalahan ketatanegaraan. Undang-undang memberikan legitimasi kepada MK untuk menerbitkan ketetapan dalam hal Permohonan tidak merupakan kewenangan MK untuk mengadili perkara yang dimohonkan dan pemohon menarik kembali Permohonan, namun UU tidak memberikan kepastian atas kekuatan hukum terhadap ketetapan tersebut. Metode penulisan yang digunakan menelaah hukum normatif, bahan-bahan pustaka atau data sekunder serta perkembangan hukum yang menunjang penulisan. Kepastian hukum atas produk hukum yudikatif dimuat dalam putusan dan produk hukum eksekutif dalam suatu keputusan, meskipun tidak tertutup kemungkinan yudikatif menerbitkan keputusan dalam hal administrasi. Ketetapan yang diterbitkan MK dalam penyelesaian perkara 1/SKLN-XVII/2019 telah menimbulkan ketidakpastian hukum, karena dalam praktek peradilan dalam hal bukan kewenangan pengadilan dalam memeriksa perkara harusnya dimuat dalam suatu putusan atau penetapan bukan ketetapan. Terlebih kekuatan hukum atas suatu putusan disebutkan jelas oleh konstitusi dan undang-undang berbeda dengan ketetapan, meskipun peraturan MK menafsirkan adalah sama.

Kata kunci: Ketetapan, putusan, kepastian hukum

Legal Analysis of the Implementation Decision of the Constitutional Court in Case 1/SKLN-XVII/2019

Prodigy Journal Vol. 7 No. 2, December 2019, page 380-396

The decision issued by the Constitutional Court in case 1/SKLN-XVII /2019 has resulted in legal uncertainty. Constitutional court as a judicial body guarding the law (the guardian of Indonesian Law) and as a constitutional interpretation (the Sole Interpreter of the Constitution), should be prioritize legal certainty especially in constitutional problem. The law gives the Constitutional Court legitimacy to issue provisions in the case that the Petition does not constitute the Court's authority to adjudicate the case being petitioned and the petitioner withdraws the Petition, but the Act does not provide certainty of the legal force over that provision. The writing method used is to study normative law, library materials or secondary data as well as legal developments that support writing. Legal certainty on judicial legal products contained in the decision and executive legal products in a decision, although it is also possible for the judiciary to issue decisions in terms of administration. The decision issued by the Constitutional Court in the settlement of case 1 / SKLN-XVII / 2019 has caused legal uncertainty, because in judicial practice in terms of not the authority of the court in examining cases should be contained in a verdict or determination rather than a decision. Especially, the legal force over a decision is clearly stated by the constitution and the law is different from the provisions, even though the Constitutional Court's interpreting rules are the same.

Keywords: Decision, verdict, legal certainty